

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi pembangunan menurut Siagian (1979:2-3) meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan. Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Dari penjelasan di atas maka Siagian (1979:3-4) menganalisis terdapat ide pokok yang perlu diperhatikan apabila berbicara tentang pembangunan, yaitu:

- a. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; dimana proses tersebut terbagi menjadi tahap-tahap yaitu berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. Bahwa pembangunan merupakan usaha secara sadar dilaksanakan
- c. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Bahwa pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- e. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensionil. Artinya bahwa modernitas mencakup seluruh aspek

kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.

- f. Bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di atas ditunjukkan kepada usaha membina bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pariwisata dalam Pembangunan

Pembangunan adalah hal yang berpengaruh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Pariwisata adalah salah satu sektor yang dianggap berperan penting dalam pembangunan bangsa karena dapat memajukan dan meratakan perekonomian suatu negara karena kegiatan pariwisata merupakan sektor yang bersifat padat karya. Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting. Sektor pariwisata diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa yang strategis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengembangan suatu daerah tujuan wisata dengan meningkatkan pelayanannya.

Pembangunan Industri pariwisata memiliki peranan yang sangat besar terhadap pengembangan ekonomi suatu negara. Berikut beberapa keuntungan dari industri pariwisata seperti yang dikemukakan oleh Spillane (1991:138), yaitu:

- a. Membuka Kesempatan Kerja
Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.
- b. Menambah Pendapatan atau Pemasukkan Masyarakat Daerah
Di daerah pariwisata tersebut, masyarakat dapat menambah pendapatan dengan menjual barang dan jasa. Misal: restoran, hotel, biro perjalanan, pramuwisata, dan barang-barang souvenir.
- c. Menambah Devisa Negara
Dengan makin banyaknya wisatawan asing yang datang, maka akan semakin banyak devisa yang diperoleh.
- d. Merangsang Pertumbuhan Kebudayaan Asli Suatu Daerah
Kebudayaan suatu daerah dapat lestari dan tubuh karena adanya pariwisata. Wisatawan asing banyak yang ingin melihat kebudayaan asli yang tidak ada duanya. Dengan demikian, kebudayaan asli dapat lestari dan berkembang dengan suburnya.

- e. Menunjang Gerak Pembangunan di Daerah
Di daerah tujuan pariwisata, banyak timbul pembangunan jalan, hotel, dan restoran, sehingga pembangunan di daerah lebih maju.

B. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di dalam Negara penerima wisatawan. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cinderamata, penginapan, dan transportasi (Wahab, 2003:5). Sedangkan Menurut Undang-undang RI Nomor 10 pasal 1 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya atau berekrasi dengan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah setempat.

Kepariwisata memiliki dua aspek kelembagaan dan aspek substansial yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya, yakni bagaimana perkembangannya dari mulai direncanakan, dikelola sampai dipasarkan pada pembeli yakni wisatawan (Wardiyana, 2006:49-50). Dalam perkembangannya pariwisata harus memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan oleh Yoeti (2008:8) bahwa pariwisata memenuhi empat kriteria yaitu:

- a. Perjalanan dilakukan dari satu tempat lain. Perjalanan dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.
- b. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih, kecuali bagi excursionist (kurang dari 24 jam)
- c. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di Negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
- d. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari Negara asalnya, dimana ia biasanya tinggal atau berdiam dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, maka timbullah berbagai jenis pariwisata yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Sedangkan menurut Pendit (2003:38-41) mengemukakan jenis-jenis pariwisata antara lain:

- a. Wisata Budaya
Wisata ini merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka seperti seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara.

b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisata dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral yang dapat menyembuhkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan baginya.

c. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. Pada mulanya banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidaklah dapat digolongkan ke dalam dunia pariwisata dengan alasan bahwa perjalanan serupa ini yaitu pameran atau pekan raya yang bersifat komersial hanya dilakukan oleh orang-orang yang harus mempunyai tujuan tertentu untuk urusan bisnis mereka dalam pekan raya tersebut. Tapi kenyataannya dewasa ini dimana pameran-pameran atau pekan raya diadakan banyak sekali dikunjungi oleh kebanyakan orang dengan tujuan ingin melihat-lihat fasilitas sarana angkutan serta sewa akomodasi dan tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukkan kesenian.

d. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awan ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

e. Wisata politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi pariwisata kegiatan politik seperti peringatan ulang tahun suatu Negara, ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, penobatan ratu inggris di London dan sebagainya dimana fasilitas akomodasi, sarana angkutan dan atraksi aneka warna diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung.

f. Wisata Pertanian

Seperti halnya wisata industri. Wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya, dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-sayur dan palawija disekitar perkebunan yang dikunjungi.

g. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih di danau, bengawan, pantai, teluk atau lepas seperti memancing berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar balapan mendayung berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air.

- h. **Wisata Buru**
Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang dimiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan
- i. **Wisata Pilgrim**
Wisata ini sedikit banyak sering dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit-bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.
- j. **Wisata Bulan Madu**
Yaitu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan merpati, pengantin baru yang sedan berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka seperti misalnya kamar pengantin di hotel yang khusus di sediakan dengan peralatan serba istimewa seperti tempat tidur yang istimewa.
- k. **Wisata Petualangan**
Dikenal sebagai istilah *Adventure Tourism* seperti masuk hutan belantara yang terjadinya belum pernah dijelajahi, penuh binatang buas, mendaki tebing termata terjal, turun kedalam sungai yang sangat curam, arum jeram disungai-sungai yang arusnya liar, masuk goa penuh misteri, mencoba wisata kutub.

2. **Potensi Pariwisata**

Potensi pariwisata yang dikembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Potensi pariwisata yang juga disebut dengan modal kepariwisataan atau sumber daya wisata, pengembangannya sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan manusia. R G Soekadijo (1997:50) menjelaskan pengertian potensi pariwisata dengan menggunakan istilah modal kepariwisataan (*tourism assets*) atau sering juga disebut sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Lebih lanjut R G Soekadijo mengemukakan bahwa:

Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi

atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksiwisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah daya, kemampuan dan kesanggupan baik yang berasal dari lingkungan alam yang dapat mendukung kehidupan manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi pariwisata merupakan suatu kemampuan dari obyekwisata yang berasal dari alam seperti keindahan alam, iklim, pantai, pegunungan, goa dan sebagainya maupun hasil budi daya manusia seperti candi, monumen, peninggalan purbakala, kesenian dan sebagainya yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung kemajuan kepariwisataan di suatu tempat atau daerah tertentu.

3. Macam Potensi Pariwisata

Suatu obyek wisata dapat memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Semakin besar dan banyak potensi yang ada dalam suatu obyek wisata maka akan semakin besar peluang untuk melakukan pengembangan. R.G. Soekadijo (1997: 51) menyatakan bahwa “Modal atau potensi pariwisata dapat berupa alam, kebudayaan dan manusia itu sendiri”. Lebih lanjut mengenai potensi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Potensi alam

Yang dimaksud dengan potensi alam adalah alam fisik, fauna dan floranya. Suatu daerah yang memiliki potensi alam ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, misalnya pantai yang indah dengan

pemandangannya, hewan-hewan tertentu yang hidup di suatu daerah dan tidak dijumpai di daerah lain, maupun jenis flora atau tumbuhan langka.

b) Potensi kebudayaan

Yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup di tengahnya suatu masyarakat (*act*) seperti cara berpakaian, cara berbicara, kegiatan di pasar dan sebagainya, maupun hasil karya suatu masyarakat (*artifact*) baik yang masih hidup maupun berupa peninggalan atau tempat bersejarah berupa monumen, goa dan sebagainya.

c) Potensi manusia

Manusia dapat menjadi atraksi wisata yang dapat menarik kedatangan wisatawan. Wisatawan dapat tertarik untuk mengunjungi suatu daerah karena sikap ramah tamah dari masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, potensi yang ada dalam suatu kawasan wisata sebagai pendukung pengembangan obyek wisata terbagi menjadi dua macam yaitu:

a) Potensi alam

Potensi alam merupakan potensi yang digali dari sumber daya alam. Potensi alam yang ada di dalamnya termasuk pemandangan alam dapat dieksploitir, digali kemudian diatur menurut kebutuhan dan kepentingan manusia. Dalam pengaturannya, potensi alam ini diusahakan untuk tidak

merusak keindahannya. Potensi alam ini terdiri dari potensi fisik seperti pantai, hutan, air terjun, danau, sungai, gunung dan sebagainya, flora dan fauna seperti tanaman langka, burung, cagar alam dan sebagainya.

b) Potensi non alam

Potensi non alam merupakan potensi yang berasal dari hasil karya manusia, yang termasuk dalam potensi ini antara lain :

- 1) Benda-benda bersejarah, seperti monumen bersejarah, sisa peradaban masa lampau, museum dan sebagainya.
- 2) Kebudayaan dan keagamaan, seperti acara tradisional, upacara perkawinan, festival, pameran, rumah ibadah, candi dan sebagainya.
- 3) Tata cara hidup masyarakat (*the way of life*) Tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu daya tarik wisatawan, seperti upacara sekaten di yogyakarta, pembakaran mayat (Ngaben) di Bali, dan sebagainya.

4. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menggali, memperbaiki dan memajukan potensi yang ada di suatu daerah tujuan wisata baik secara fisik maupun sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melestarikan identitas budaya dan meminimalkan dampak negatifnya. Pengembangan pariwisata menurut Musanef (1995) adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan sarana prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Sedangkan Dalam istilah sederhana Wicks dan

Merret (2003) menjelaskan pengembangan pariwisata adalah tentang menjual barang dan jasa kepada orang-orang (wisatawan) tidak dari daerah pasar lokal.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan pengembangan pariwisata adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pengembangan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pengembangan dalam pariwisata diantaranya:

a. Perencanaan Produk Wisata

Perencanaan produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Suwantoro (1997:47), menjelaskan yang dimaksud dengan *product* adalah sesuatu yang dihasilkan melalui suatu proses produksi. Produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata. Produk ini merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial, psikologis dan alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi. Jadi produk wisata merupakan berbagai jasa yang saling terkait, yaitu:

- 1) Jasa yang disediakan perusahaan antara lain jasa angkutan, penginapan, pelayanan makan minum, jasa tour, dan sebagainya.
- 2) Jasa yang disediakan masyarakat dan pemerintah antara lain berbagai prasarana utilitas, umum kemudahan, karamah-tamahan, adat istiadat, seni budaya, dan sebagainya.

- 3) Jasa yang disediakan alam antara lain pemandangan alam, pegunungan, pantai, gua alam, taman laut, dan sebagainya.

Produk wisata juga merupakan gabungan dari berbagai komponen, antara lain:

- 1) Atraksi suatu daerah tujuan wisata.
- 2) Fasilitas umum atau amenities yang tersedia.
- 3) Aksesibilitas ke dan dari daerah tujuan wisata.

Jadi pada umumnya, produk wisata adalah sebagai keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya dan kembali ke rumah dimana ia berangkat semula (Suwantoro, 1997:49).

b. Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Dalam mengembangkan pariwisata dibutuhkan suatu cara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan diantaranya adalah pemasaran dan promosi pariwisata. Yoeti (1996:28) mendefinisikan pemasaran adalah pelaksanaan dari pada kegiatan usaha dan niaga yang diarahkan kepada yang bersangkutan dengan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen dan konsumen atau pamakai. Menurut W. Lazar dan E.J Kelley sebagaimana dikutip oleh Yoeti (1996:40), terdapat tiga faktor pengembangan dalam pemasaran pariwisata, yakni:

- 1) *Product Instrument*. Untuk memudahkan pelayanan kepada wisatawan maka kepada wisatawan dijual produk dalam bentuk paket untuk mendapatkan pelayanan terpadu
- 2) *Distribution instrument*. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan wisatawan itu, masing-masing wisatawan tidak perlu berhubungan langsung dengan tiap perusahaan yang menghasikan produk atau jasa,

tetapi cukup berhubungan perantara seperti: *Tour Operation, Travel Agent, Representative Office, Reservation Service*, yang merupakan distributor channel mereka.

- 3) *Promotion Instrument*. Agar para wisatawan dapat mengetahui tentang produk apa saja yang tersedia, objek dan atraksi apa saja yang perlu dilihat, fasilitas apa saja yang dapat dinikmati, maka wisatawan perlu diberikan informasi melalui bahan-bahan promosi yang dikirim secara kontinu, melalui Travel Mark atau pameran, pengirim tim kesenian, sehingga wisatawan tertarik berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Menurut Yoeti (2008:82) sebelum suatu daerah tujuan wisata melakukan promosi pariwisata, maka yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah sarana dan prasarana wisata yang memadai. Hal ini diperlukan karena seseorang atau sekelompok orang yang menjadi wisatawan sebelum melakukan perjalanan wisata, ia ingin mengetahui terlebih dahulu sudah siapkah daerah tujuan wisata tersebut menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

1. Sarana Pariwisata

Sarana pariwisata adalah fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada wisatawan.

a) Sarana Pokok Pariwisata

Adalah fasilitas minimal yang harus terdapat pada suatu daerah tujuan wisata yang terdiri dari: hotel atau penginapan, rumah makan.

b) Sarana Pelengkap Pariwisata

Adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sehingga fungsi sarana pelengkap ini dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan. Adapun yang termasuk dalam sarana ini adalah sarana musholla, olah raga.

c) Sarana Penunjang Pariwisata

Adalah sarana yang diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ke tempat yang dikunjungi. Misalnya, *souvenir*.

2. Prasarana Pariwisata

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang akhirnya akan meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Menurut Yoeti (2008:83) yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan semua manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dimana dibagi menjadi:

- 1) Prasarana ekonomi: meliputi sistem perbankan, telekomunikasi, listrik, dan sumber air
- 2) Prasarana sosial: Meliputi pelayanan kesehatan, petugas yang langsung melayani wisatawan, faktor keamanan.

d. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Partisipasi masyarakat di sekitar obyek wisata sangat berperan penting dalam pembangunan pariwisata. Hal ini disebabkan karena masyarakat di sekitar

obyek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh wisatawan. Menurut Khadiyanto (2007:31), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata memiliki beberapa prinsip yang salah satunya adalah memberdayakan masyarakat setempat, sehingga akan muncul rasa keinginan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata dan juga ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi, pengendalian dan penyelenggaraan program pariwisata.

Dalam mengembangkan kepariwisataan peran masyarakat dibagi menjadi tiga bagian sebagaimana dijelaskan oleh Harun (2004:14), yaitu:

- 1) Masyarakat Sadar Wisata
Sadar Wisata merupakan pemahaman akan arti dan hakekat dari pengembangan pariwisata, tetapi lebih jauh lagi dapat diartikan sebagai peranan, posisi, dan misi pariwisata dalam pembangunan nasional. Masyarakat Sadar Wisata dimaksudkan untuk menumbuhkan pengertian agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami tugas dan fungsi pembangunan pariwisata beserta permasalahan yang dihadapi.
- 2) Tingkat Kesadaran Wisata
Pengembangan pariwisata secara nyata akan melibatkan semua lapisan masyarakat, semua kalangan atas sampai pada lapisan yang paling bawah, atau seringkali diistilahkan sebagai *stakeholder* pelaku pariwisata yang meliputi kalangan pemerintah, pelaku usaha pariwisata dan usaha terkait, serta masyarakat luas. Sehingga seluruh stake holder diharapkan turut membantu dan memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata. Sikap dan tindakan sekuruh stakeholder pelaku pariwisata akan berkembang

kearah yang positif apabila dalam diri mereka tumbuh kesadaran dan motivasi untuk aktif berperan dalam kegiatan pengembangan pariwisata.

3) Menggalang Peran Serta Masyarakat

Dalam kepariwisataan pengertian masyarakat dapat didefinisikan sebagai 3 komponen pokok yaitu stakeholder, pelaku pariwisata yang memiliki: pemerintah, industry atau usaha pariwisata dan masyarakat luas.

5. Manfaat Pariwisata

Pariwisata memberikan manfaat bagi setiap manusia, karena pariwisata dapat melepas penat dalam aktifitas sehari-hari. Oleh sebab itu para manusia membutuhkan dunia pariwisata karena pariwisata dapat menyegarkan pikiran.

Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan & ilmu pengetahuan, peluang & kesempatan kerja. Menurut Wahab (2003:9-10) adapun ringkasan manfaat-manfaat pariwisata bagi suatu Negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat, dan cita rasa yang beraneka ragam pula.
- b. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasionalnya misalnya:
 - 1) Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan pembangunan dan pembaharuan fasilitas wisata. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan subprasarana pariwisata.
 - 2) Menggugah industry-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata, misalnya: usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa industry misalnya: peralatan hotel, kerajinan tangan.
 - 3) Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian.
 - 4) Memperluas pasar barang-barang lokal.

- 5) Menunjang pendapatan Negara dengan valuta asing sehingga mengurangi defisit di dalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional.
 - 6) Memberi dampak positif pada tenaga kerja di Negara karena Pariwisata memperluas lapangan kerja baru.
 - 7) Mengisi salah satu faktor pendistribusian kembali yang sangat efektif di dalam tata ekonomi internasional, seperti mempercepat sirkulasi ekonomi dalam suatu Negara kunjungan akan memperbesar hasil gandanya (*multiplier effect*) akibat dari suatu bagian pengeluaran wisatawan asing dalam menciptakan pendapatan lanjutan dalam perekonomian suatu Negara serta dapat membantu pembangunan daerah-daerah terpencil dalam suatu Negara jika daerah itu memiliki daya tarik pariwisata.
- c. Berguna sebagai sarana untuk meningkatkan saling pengertian internasional dan sebagai alat pemenang dalam ketegangan-ketegangan politik.
- d. Pariwisata juga berperan meningkatkan kesehatan. Pergantian tempat dan iklim serta menjauhkan diri dari segala kehidupan rutin sehari-hari. Semua ini akan menambah daya tahan dan sangat menurunkan ketegangan syaraf.

6. Dampak Pengembangan Pariwisata

Sejalan dengan perkembangannya pariwisata secara tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Sammeng (2001:199-258) menjelaskan bahwa Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Sengaja kata Dampak itu terlebih dahulu diperjelas berdasarkan sumber baku (Kamus), karena ada kecenderungan menafsirkan atau mengartikan kata Dampak hanya dari segi pengaruh negatif. Padahal kata Dampak mengandung makna pengaruh positif dan pengaruh negatif. Menurut Spillane (1989:47) dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata adalah positif dan negatif, yaitu:

- a. Dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi:
 - 1) Memperluas lapangan kerja.
 - 2) Bertambahnya kesempatan berusaha.
 - 3) Meningkatkan pendapatan.
 - 4) Terpeliharanya kebudayaan setempat.
 - 5) Dikenalnya kebudayaan setempat oleh wisatawan.

- b. Sedangkan dampak negatifnya dari pariwisata tersebut akan menyebabkan:
- 1) Terjadinya tekanan tambahan penduduk akibat pendatang baru dari luar daerah.
 - 2) Timbulnya komersialisasi.
 - 3) Berkembangnya pola hidup konsumtif.
 - 4) Terganggunya lingkungan.
 - 5) Semakin terbatasnya lahan pertanian.
 - 6) Penceraan budaya.
 - 7) Terdesaknya masyarakat setempat

Dalam suatu penyelenggaraan pariwisata dan objek wisata dapat memberikan dampak positif, menurut Jonh M. Bryden sebagaimana dikutip oleh Abdurachmat dan Maryani, 1998:79) yang menyebutkan setidaknya ada 6 butir dampak positif yaitu:

- a. Penyumbang devisa Negara.
- b. Menyebarkan pembangunan
- c. Menciptakan lapangan kerja
- d. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampak penggandaan (multiplier effect).
- e. Wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa di dunia semakin luas.
- f. Mendorong semakin meningkatnya pendidikan dan keterampilan penduduk.

Sedangkan dampak-dampak negatif yang timbul dari pengembangan pariwisata secara ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Abdurachmat dan Maryani (1998:80) yaitu:

- a. Semakin ketatnya persaingan harga antar sektor.
- b. Harga lahan yang semakin tinggi.
- c. Mendorong timbulnya inflasi.
- d. Bahaya terhadap ketergantungan yang tinggi dari Negara terhadap pariwisata.
- e. Meningkatnya kecenderungan impor.
- f. Menciptakan biaya-biaya yang banyak.
- g. Perubahan sistem nilai dalam moral, etika, kepercayaan, dan tata pergaulan dalam masyarakat, misalnya mengikis kehidupan bergotong-gotong, sopan santun dan lain-lain
- h. Memudahkan kegiatan mata-mata dan penyebaran obat terlarang.
- i. Dapat meningkatkan pencemaran lingkungan seperti sampah, vandalisme (corat-coret), rusaknya habitat flora dan fauna tertentu, polusi air, udara, dan tanah.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan obyek wisata perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan pengembangan obyek wisata. Nyoman S. Pendit (2002: 67) mengemukakan “Persyaratan yang menjadi faktor penentu pengembangan daerah tujuan wisata yaitu : faktor alam, sosial budaya, sejarah, agama, fasilitas rekreasi, kesehatan, hiburan, berbelanja, infrastruktur dan fasilitas pangan dan akomodasi”.

Perwilayahan dalam dunia kepariwisataan adalah pembagian wilayah wilayah pariwisata yang dapat dipandang memiliki potensi, yang selanjutnya dapat dijadikan tujuan yang pasti. Dalam pengertian ilmiahnya wilayah ini disebut daerah tujuan wisata, yang memiliki batasan-batasan sebagaimana dijelaskan oleh Nyoman S. Pendit (2002: 66) yaitu “Yang dimaksud dengan wilayah pariwisata adalah tempat atau daerah yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas-fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi obyek kebutuhan wisatawan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan guna memperoleh hasil yang optimal hendaknya memperhatikan faktor-faktor penentu pengembangan suatu daerah tujuan wisata yaitu :

- (1) Tersedianya obyek wisata atau atraksi yang dapat dinikmati atau disaksikan, baik yang berasal dari alam maupun hasil budi daya manusia.
- (2) Tersedianya sarana transportasi dan perhubungan.

- (3) Tersedianya komponen penunjang yaitu menyediakan tempat untuk tinggal sementara

Atraksi atau obyek yang menarik adalah sesuatu yang dapat dihubungkan dengan keadaan alam, kebudayaan, perkembangan ekonomi, politik, lalu lintas, kegiatan olah raga dan sebagainya, tergantung pada kekayaan suatu daerah dalam pemilikan atraksi atau obyek ini. Wilayah pariwisata yang paling ideal dan dapat menjamin maksud serta tujuan industri wisata sesuai dengan fungsinya adalah daerah tujuan wisata yang benar-benar dapat memberikan atraksi beraneka ragam, baik yang dimiliki alam sekitar sebagai obyek yang tidak bergerak maupun yang merupakan manifestasi budaya tinggi khas bersifat daerah atau nasional sebagai obyek bergerak, serta dapat memperlihatkan kegiatan kehidupan rakyat di sekitarnya.

C. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Sejak diberlakukannya otonomi daerah fokus pembangunan di daerah pedesaan saat ini menjadi lebih terarah, sehingga dengan demikian terjadilah perubahan sosial yang dirasakan masyarakat dari urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang atau akan pergi ke desa untuk berekreasi). Menurut Nuryanti (1993:2-3) yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku

Departemen pariwisata telah membuat program yang disebut pola PIR (Pariwisata Inti Rakyat, untuk mengembangkan pembangunan desa wisata.

Adapun pengertian dari desa wisata adalah:

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah : Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, social budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Priasukmana, 2001:38)

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Desa Wisata adalah pengembangan suatu wilayah (desa) dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema dan memenuhi serangkaian kebutuhan suatu perjalanan wisata, baik dari aspek daya tarik maupun berbagai fasilitas pendukungnya.

Untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, harus memiliki 3 syarat sebagaimana yang diungkapkan oleh Putra (2006:71-72), yaitu :

- a. Daerah ini harus mempunyai “something to see”, artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain, daerah tersebut harus mempunyai daya tarik khusus.
- b. Di daerah tersebut harus tersedia “something to do”, artinya di daerah tersebut di samping banyak yang dapat dilihat, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- c. Di daerah tersebut harus ada “something to buy”, artinya di tempat itu harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja, terutama souvenir kerajinan masyarakat setempat sebagai kenang-kenangan, di samping itu perlu juga disediakan tempat penukaran uang asing dan telekomunikasi

Suatu kawasan wisata dapat meliputi lebih dari sebuah desa dengan satu objek utama. Jadi, desa merupakan unit terkecil pengembangan suatu kawasan. Dalam hubungannya dengan kepariwisataan dapat dikategorikan 3 jenis desa, yaitu :

- a. Desa Domisili, merupakan desa yang ada akomodasi sebagai tempat menetap sementara wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata.
- b. Desa Kunjungan, merupakan desa yang mengadakan pertunjukan kesenian bagi wisatawan dengan mengambil tempat di desa yang ada artshop atau objek lainnya.
- c. Desa Penunjang, merupakan desa yang menghasilkan barang untuk hotel, restoran (benda – benda souvenir), akan tetapi desa tersebut tidak dikunjungi wisatawan Geriya dalam (Putra, 2006:72)

2. Persyaratan Desa Wisata

Melihat definisi desa wisata, desa-desa yang dapat dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik dari desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar menjadi suatu daerah tujuan wisata dan dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, adapun persyaratan-persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk dan dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas (Priasukmana, 2001:38).

Dalam mengembangkan desa wisata harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Putra (2006:73) syarat-syarat dari Desa Wisata adalah :

- a. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat.
- b. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.
- c. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya.
- d. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata.
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dalam mengembangkan suatu wilayah (desa) untuk menjadi suatu Desa Wisata, perlu diteliti terlebih dahulu apakah wilayah tersebut memenuhi syarat-syarat Desa Wisata. Syarat-syarat tersebut antara lain memiliki potensi wisata dan budaya yang khas, lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual, diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya, adanya aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung program Desa Wisata serta terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

3. Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Pelaksanaan pembangunan pasti ada tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan pembangunan desa wisata. Secara garis besar tujuan pembangunan desa wisata antara lain adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan jalan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing masyarakat dengan perekonomian swasta yang semakin mendominasi perekonomian dan mendorong para pelaku usaha lebih kreatif dalam

pembangunan desa wisata yang lebih inovatif. Lebih rinci lagi tujuan pembangunan dari desa wisata adalah sebagai berikut.

- a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif.
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa.
- d. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relative lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi (Ruralisasi)
- e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi.
- f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi.
- g. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa mengatasi disintegrasi (Priasukmana, 2001:38-39)

4. Langkah-langkah Kebijakan

Dalam pembangunan desa wisata untuk mencapai tujuan maka diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkannya. Menurut Priasukmana (2001:40-42) untuk suksesnya pembangunan desa wisata, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan. Keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya diberikan kepada para petugas kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena penduduk desa umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani.
- b. Kemitraan
Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak

Pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang yang bisa dikerjasamakan antara lain seperti : bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

- c. Kegiatan Pemerintahan Desa
Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti : rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
- d. Promosi
Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak ataupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.
- e. Festival atau Pertandingan
Secara rutin desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan lain sebagainya.
- f. Membina Organisasi Warga
Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka
- g. Kerjasama Universitas
Universitas-universita di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena untuk untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Kamus Ekonomi sebagaimana dikutip oleh Christpher Pass dan Bryan Lowes (1994:287) menjelaskan pendapatan (income) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba

dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya

Senada dengan definisi di atas, Menurut Kadariyah (1981:26) pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah/gaji, bunga sewa, dividend, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya seminggu, sebulan atau setahun. Selain itu, Dalam mengukur kondisi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (winardi, 1998:245).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan, instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya agar bisa memenuhi segala kebutuhannya.

2. Sumber Pendapatan

Dalam memperoleh pendapatan berbagai macam cara bisa dilakukan untuk memperolehnya, Dengan demikian Sangatlah penting untuk mengenal dan mengidentifikasi sumber pendapatan agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. menurut biro pusat statistik sebagaimana dikutip oleh Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter-Evers (1982:92-94), pendapatan terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pendapatan berupa uang
Sumber-sumber pendapatannya adalah:
 - 1) Gaji dan upah yang diperoleh dari:
 - a) Kerja pokok
 - b) Kerja sampingan
 - c) Kerja lembur
 - d) Kerja kadang-kadang
 - 2) Usaha sendiri, yang meliputi:
 - a) Hasil bersih dari usaha sendiri
 - b) Komisi
 - c) Penjualan dari kerajinan rumah
 - 3) Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah
 - 4) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang di peroleh dari kerja social
- b. Pendapatan berupa barang
Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan berupa:
 - 1) Bagian pembayaran upah dan gaji yang ditentukan dalam:
 - a) Beras
 - b) Pengobatan
 - c) Transportasi
 - d) Perumahan
 - e) Rekreasi
 - 2) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, antara lain:
 - a) Pemakaian barang yang diproduksi di rumah
 - b) Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
 - 3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa:
 - a) Pengambilan tabungan
 - b) Penjualan barang-barang yang dipakai
 - c) Penagihan piutang
 - d) Pinjaman uang
 - e) Kiriman uang
 - f) Hadiah/pemberian
 - g) Warisan
 - h) Menang judi.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari berbagai macam hal diantaranya sumber pendapatan berupa uang yaitu sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau prestasi dan sumber pendapatan berupa barang sifatnya reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa.

E. Innovative Governance

1. Pengertian *Innovative Governance*

innovative governance adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru : ide baru, metode baru, maupun pendekatan baru, serta upaya untuk mencari solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja governance (Sumarto, 2009:14). Konsep inovasi pada pemerintahan sangat penting dikembangkan pada pemerintahan pusat maupun daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Kim dan Chang (2009:294) : “inovasi dalam pemerintahan telah menjadi bidang utama studi dan sebagai tempat yang mungkin untuk perbaikan kinerja”, sedangkan makna penting inovasi pemerintahan (*innovation in government*) telah menjadi perbincangan dan kajian yang menarik, khususnya berkenaan dengan pencapaian pemerintahan daerah yang melaksanakan desentralisasi (Borins, 2002 : 467-476)

Inovasi sangat penting bagi sector publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulgan dan Albury (2003:5) yaitu : Mengapa inovasi penting untuk sector public, pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik bergantung pada inovasi untuk sukses dan mengembangkan cara yang lebih baik untuk sukses dan mengembangkan cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan menggunakan sumber daya dan teknologi. Inovasi kadang-kadang dilihat sebagai sebuah kemewahan atau beban tambahan. Ini harus dilihat sebagai kegiatan inti: (a) meningkatkan responsivitas layanan untuk kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat”.

Pemerintah yang kreatif akan selalu menemukan cara untuk mengeluarkan potensi inovatifnya dan menerapkannya dengan cara berpikir dan cara mereka bekerja, sedangkan (Mulgan dan Albury, 2003:2) menyatakan:

“Inovasi harus menjadi aktivitas inti dari sektor publik, membantu pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai public, menanggapi harapan warga dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, meningkatkan efisiensi pelayanan dan meminimalkan biaya. Apalagi sector public telah berhasil inovasi dimasa lalu pemerintah yang efektif dan pelayanan public tergantung pada inovasi yang sukses untuk mengembangkan cara yang lebih baik memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan menggunakan sumber daya dan teknologi”.

Selain itu di dalam sektor publik inovasi pada umumnya dikaitkan dengan modernisasi Negara, manajemen pembelajaran, pembelajaran organisasi, dan pendekatan untuk mengembangkan kreativitas atau kewirausahaan. (Bingham, 1976:223-232) mengidentifikasi tiga variabel yang memberikan kontribusi bagi inovasi oleh pemerintah lokal; yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan organisasi, dan karakteristik organisasi. Bagi organisasi publik, terdiri dari hubungan dengan unit pemerintah lain. Sedangkan senge (1990), sebagaimana dikutip Martin (2000:11) menjelaskan:

“Inovasi terjadi ketika orang mengembangkan wawasan baru ke dalam cara kerja. Peningkatan kapasitas mengacu pada proses yang memungkinkan orang untuk memperoleh dan mengembangkan wawasan baru ke dalam cara mereka bekerja dan memecahkan masalah. Sementara daya serap merujuk terutama untuk pembelajaran individual, membangun kapasitas inovatif mengacu pada pembelajaran organisasi”.

Pentingnya inovasi pada pemerintahan lokal di Indonesia mulai menjadi perhatian sejak terjadinya pergeseran system pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, yang dimaknai penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas

fungsi public dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, adalah sebuah konsep yang kompleks dan beraneka segi. Menurut Hossein, (2002:12) menjelaskan, pada awalnya hakekat desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritorir tertentu, yang kemudian terjawantahkan dalam elemen wewenang mengatur dan mengurus yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintah daerah. Menurut Abdullah (2006:25) Pemerintah daerah yang mengetahui kelemahan dan kelebihan untuk mengelola permasalahan di daerahnya dituntut seinovatif mungkin untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan pendanaan. Inovasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan kretifitas.

Dengan demikian dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam pemerintah daerah inovasi merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai tujuan antara lain untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Selain itu, kompetisi kota-kota di dunia juga menjadi alasan pentingnya sebuah inovasi.

2. Faktor Pendorong Innovative Governance

Dalam mencapai reformasi sejati pada proses governance dapat dikemukakan setidaknya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi dalam terwujudnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Menurut Sumarto (2009:100-111) ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam inovasi antara lain:

a. Faktor Lingkungan : Krisis, Demokrasi, dan Kesempatan Politik

Berdasarkan pengalaman berbagai prakarsa yang sudah berjalan, satu hal yang paling mendasar yang memungkinkan suatu gagasan yang inovatif tertuang dalam tindakan nyata adalah keberadaan individu-individu yang memiliki motivasi tinggi untuk melakukan perubahan. Namun untuk membuat seseorang yang bermotivasi dapat menginisiasi suatu tindakan nyata ada beberapa kondisi yang diperlukan yaitu: adanya kesempatan, adanya kemampuan mengambil resiko, adanya akses terhadap sumber daya, dan adanya peluang untuk mendiseminasikan gagasannya.

b. Keberadaan Arsitek Inovasi dan Pemimpin Berevisi

Arsitek inovasi berperan penting untuk membuat suatu gagasan menjadi suatu tindakan nyata. Seorang arsitek inovasi bisa muncul dari lingkungan LSM, akademisi maupun pemerintah. Selain peran arsitek inovasi, satu factor lain yang mendorong suksesnya suatu inovasi untuk meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kualitas *governance* adalah keberadaan *visionary leader*. Keterbukaan wawasan eksekutif dan legislative yang menjadikan pemimpin yang memiliki visi dan terbuka terhadap perubahan akan mendorong dihasilkannya kebijakan yang pro-partisipasi dan mendorong terinstitusionalkannya metode-metode partisipasi dalam proses *governance*.

c. Keberadaan Kelompok Pendukung

Kelompok pendukung biasanya datang dari luar eksekutif dan legislative. Salah satu peran kelompok pendukung adalah untuk memotivasi proses perubahan secara konsisten mealui bermacam-macam fasilitas dan amunisi yang terpenting diantaranya adalah bantuan atau asistensi teknis, kesempatan melakukan studi banding, dan dukungan dana.

d. Partisipasi Warga

Yang dimaksud partisipasi warga dalam *governance* adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya.

e. Dukungan dan Pertukaran Antar Rekan Sejahwat

Dukungan dan pertukaran antar rekan sejahwat adalah satu bentuk dukungan noral yang berpengaruh. Berbagai literatur menekankan aspek leadership sebagai satu prasyarat untuk menjalankan aksi yang kongkret di lapangan menuju suatu perubahan yang inovatif.

f. Struktur Manajemen dan Struktur Insentif

Proses *governance* yang baru membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja yang baru. Berbagai tantangan dan masalah harus diatasi dengan sikap dan kultur yang berbeda. Konfigurasi baru dalam sturktur manajemen harus mendukung adanya perilaku dan kompetensi baru yang dibutuhkan untuk perubahan.

3. Faktor Penghambat Innovatitive Governance

Dalam menumbuhkan ide-ide kreatif ada faktor yang menghambat dalam proses kreatif dan inovatif. Menurut (Borins, 2005:467-476) ada tiga penghambat dalam inovasi. Pertama, muncul dari dalam birokrasi itu sendiri, yaitu sikap yang skeptis dan enggan berubah; kedua, berasal dari lingkungan politik. Tuntutan organisasi kadang-kadang tidak bisa dipenuhi karena lingkungan politik yang tidak kondusif seperti penambahan anggaran, peraturan-peraturan yang menghambat dan kepentingan-kepentingan golongan. Hambatan yang ketiga berasal dari lingkungan di luar sektor public seperti keraguan publik terhadap efektivitas suatu program, kesulitan melaksanakan program, terutama dalam menentukan kelompok sasaran.

Sehubungan dengan kondisi pemerintahan daerah saat ini pemahaman akan makna pentingnya konsep inovasi sangat dibutuhkan, namun dalam mengembangkan konsep inovasi ini terdapat berbagai macam hambatan yang saat ini telah menjadi isu aktual dalam pemerintahan daerah. Di samping itu kajian tentang inovasi di pemerintah daerah saat ini juga belum banyak dilakukan. Kondisi inilah yang membawa konsep inovasi perlu dikaji dalam ranah pemerintah daerah yaitu dengan mereposisinya pada tataran tiga kondisi, yaitu kepemimpinan, iklim organisasi, dan lingkungan politik. Dari ketiga konsep tersebut maka dapat ditata dalam sebuah model sebagai bagian untuk mendesain inovasi bagi pemerintah daerah.